



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

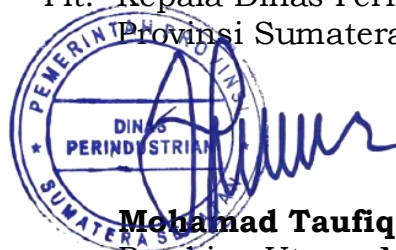
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, sehingga Buku Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 meliputi program prioritas daerah tahun 2026, rencana program/kegiatan tahun 2026, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (2025), serta Tujuan, sasaran Program/Kegiatan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan nasional. Data dan informasi yang menjadi bahan evaluasi dalam laporan ini, beberapa masih bersifat sementara dikarenakan saat pengambilan data berlangsung dalam tahun 2025 (tahun berjalan).

Akhir kata, semoga buku Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan ini dapat membantu dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan program/kegiatan di tahun 2026 mendatang.

Palembang, 5 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan



Mohamad Taufiq, SIP.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP 196511121995122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN	
2026	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.....
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait verifikasi dan validasi nomenklatur (diperbarui dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Pemerintah Daerah Provinsi diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang telah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, di mana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan terkait RKPD dan prioritas pembangunan provinsi. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan di provinsi, Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, termasuk pengembangan industri, peningkatan daya saing UMKM industri, promosi investasi industri, dan dukungan terhadap prioritas nasional serta provinsi seperti reformasi birokrasi, ketahanan pangan berbasis industri, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan industri yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat serta pelaku industri yang tumbuh berkembang di Provinsi Sumatera Selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (dan perubahannya), serta mendukung arah perencanaan pembangunan daerah, termasuk fokus pada 9 isu strategis dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2026 seperti peningkatan kualitas SDM industri, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis industri.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mencakup:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
- 2) Pelaksanaan orientasi dan pembekalan mengenai penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah sesuai pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Permendagri terkait penyusunan RKPD dan Renja);
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Tahunan, termasuk jadwal pengumpulan data, analisis kinerja, pembahasan internal, desk verifikasi, hingga penetapan dokumen akhir.

b) Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sama dengan penyusunan RKPD Provinsi. Data dan informasi yang diolah difokuskan pada analisis kondisi kinerja serta permasalahan pelayanan internal Dinas, mencakup aspek berikut:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (perizinan industri, pendampingan IKM industri, promosi investasi, dan pengembangan kawasan industri);
- 2) Organisasi dan tatalaksana Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas;

- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah provinsi terkait pengembangan industri;
- 6) Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
- 7) Pedoman dan standar teknis perencanaan serta pelayanan industri;
- 8) Data kependudukan provinsi dan informasi dasar kewilayahan relevan dengan sektor industri;
- 9) Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- 10) Program dan kegiatan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi yang terkait industri;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (jumlah industri, investasi, tenaga kerja, ekspor, dll.);
- 12) Informasi lain terkait pelayanan dan perkembangan industri provinsi.

c) Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyajikan indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Mengidentifikasi variabel dan data mentah setiap indikator sesuai format Laporan Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
- 3) Mengidentifikasi target kinerja dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai tahun 2025 serta perkiraan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD 2026.
- 5) Menyajikan data pokok pembangunan sektor industri yang mencakup definisi, rumus, tabel, analisis, dan data dukung indikator kinerja.

d) Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun sebelumnya dilakukan dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya, atau terlampauinya target kinerja program dan kegiatan.
- 5) Implikasi terhadap pencapaian target program dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) Kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi Renstra tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Perumusan permasalahan pembangunan sektor industri yang dikaitkan dengan capaian kinerja Renstra serta pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 4) Identifikasi kebijakan dan strategi yang diperlukan pada tahun perencanaan, termasuk program atau kegiatan yang perlu diprioritaskan untuk mencapai target kinerja secara optimal.

e) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Isu-isu penting yang dimaksud meliputi:

- 1) Tingkat dan pengukuran kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta dukungan terhadap program nasional dan internasional, termasuk SPM dan SDGs.
- 4) Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan dan pengembangan sektor industri daerah.
- 6) Formulasi isu-isu strategis berupa rekomendasi dan catatan penting sebagai bahan perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun perencanaan.

f) Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, yang disusun berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran kinerja dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan.

Tahapan telaahan meliputi:

- 1) Identifikasi program dan kegiatan prioritas dalam rancangan awal RKPD.
- 2) Penilaian kesesuaian antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Identifikasi program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan sesuai objek pendapatan dan pembiayaan daerah.

g) Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta dikaitkan dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

h) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengacu pada indikator dan target kinerja dalam Renstra.

i) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan terhadap kebutuhan pembangunan sektor industri. Usulan yang bersifat teknis dan berada di luar kewenangan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan Perangkat Daerah terkait melalui mekanisme perencanaan daerah.

j) Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis

Perumusan program dan kegiatan prioritas dilakukan berdasarkan urgensi, relevansi, serta kemampuan daerah dalam mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan sektor industri Provinsi Sumatera Selatan.

k) Penyajian Awal Dokumen Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan merupakan proses penyajian seluruh hasil analisis, perumusan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan ke dalam satu dokumen perencanaan.

l) Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional difokuskan pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang relevan dengan sektor industri dan pembangunan daerah, antara lain reformasi birokrasi, peningkatan iklim investasi dan usaha, pengembangan industri, inovasi teknologi, ketahanan pangan, energi, lingkungan hidup, serta penguatan ekonomi kreatif.

m) Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dilakukan berdasarkan masukan hasil verifikasi dan desk pembahasan rancangan kerja.

n) Pembahasan Forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyelaraskan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan masukan dan kesepakatan hasil forum perencanaan daerah.

o) Penyesuaian Dokumen Renja Perangkat Daerah

Penyesuaian dokumen Renja dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah agar selaras dengan kebijakan, prioritas pembangunan daerah, dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:

1. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 70 Tambahan Negara No. 1814);
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2017-2037;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 873/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah:

1. Sebagai panduan yang terencana bagi aparatur dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap

(tahunan) terhadap target capaian program/kegiatan dalam satu tahun.

2. Sebagai pedoman yang bersifat yuridis formal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang maupun unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi antar bidang/unit kerja melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Sebagai koreksi terhadap pelaksanaan pencapaian program/kegiatan setiap tahunnya untuk kemudian diadakan perbaikan di tahun perencanaan selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian renja dinas perindustrian provinsi sumatera selatan tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis

penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan, serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan kebijakan nasional dan daerah yang relevan dengan sektor industri, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan beserta pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026.

BAB V : PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstras Perangka Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas capaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2026.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2025 terhadap target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2026.

Untuk tahun anggaran 2025, pagu Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berjumlah Rp. 12.394.033.455,- yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan dan 45 subkegiatan, dari hasil pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun Anggaran 2025 realisasi keuangan sebesar Rp. 11.162.857.076,00 atau mencapai 90,07% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terlihat pada Tabel T-C. 29 :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Sumatera Selatan**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n - 1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100

3.31.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	-	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 dokumen	100%

3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	38	37 orang	37 orang	100%	38	38 orang / bulan	100%
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	24	7 orang	7 orang	100%	1	1 dokumen	100%
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0
3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	2	1 laporan	100
3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0
3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0

3.31.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 laporan	100
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100%	100%	-	-	-	100	100%	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	3 orang	-	-	-	7	7 orang	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	3 orang	-	-	-	-	-	-
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100

		<i>dengan baik</i>								
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 Paket	100
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	1 Paket	100
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 Paket	100
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 Paket	100
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	1 Paket	100
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1	1 dokumen	0
3.31.01.1.06.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 laporan	100
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 laporan	100
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 laporan	100

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1	1 laporan	100
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	100%	100	100%	100	100	100%	100
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 kendaraan	9 unit	9 unit	100%	9	9 Unit	100
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 Paket	1 Paket	100%	1	1 Unit	100
3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100%	1	1 Unit	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100

	Pembangunan Industri Provinsi	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100

		dengan baik								
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100

3.31.03.1.01.03	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100

3.31.04.1.01	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 dokumen	100

Berdasarkan Tabel T-C.29, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja pada Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya, diperoleh gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 9) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 10) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 11) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 12) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- 14) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 15) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 16) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserata Atribut Kelengkapannya
- 18) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 19) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 20) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 21) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 22) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 23) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 24) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 25) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 26) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 27) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 28) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 29) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 30) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 31) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 32) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 33) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 34) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 35) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 36) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- 37) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 38) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 39) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 40) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 41) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 42) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi
- 43) Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- 44) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 45) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keeluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dilakukan review terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta analisis implikasi atau dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan dinas secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan kebijakan dan langkah perencanaan serta penganggaran yang diperlukan guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun perencanaan berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi

Sumatera Selatan

Indikator kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yaitu ikut serta dalam pencapaian Misi ke-tiga yaitu Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. Analisis kinerja Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Misi ke-tiga pada tahun 2025 ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian indikator Kinerja pada Tabel T-C 30.

Adapun Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	URUSAN PERINDUSTRIAN											
1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)			18,27	18,90	19,53	20,03			19,53	20,03	
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)			5,10	5,15	5,16	5,17			5,16	5,17	
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi			NA	2,34	2,39	2,44	na		2,39	2,44	

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini dilakukan melalui klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai, sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus mampu menggambarkan secara jelas posisi kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran kinerja didasarkan pada perbandingan antara target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase tingkat capaian, yang dihitung dengan rumus:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Hasil kinerja pembangunan industri pengolahan

- a) **Indikator Kinerja** : Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB).
- b) **Indikator Kinerja** : Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.
- c) **Indikator Kinerja** : Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Perencanaan SKPD

Hal yang penting dari kinerja perencanaan Perangkat Daerah adalah bagaimana strategi penyusunan perencanaan itu sendiri dibuat dalam konsep yang SMART untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Perangkat Daerah. Semua upaya tersebut dituangkan dalam perencanaan penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi/kesinergian antara program/kegiatan yang ada di Kab/kota, provinsi maupun pusat.

Kesinergian program/kegiatan antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui Rapat koordinasi teknis program/kegiatan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dari 17 Kab/kota. Dalam rapat teknis ini usulan program/kegiatan kab/kota yang telah disusun berdasarkan potensi dari masing-masing Kab/kota, yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang ada dan berdasarkan sistem prioritas pembangunan daerah, di selaraskan dengan sasaran dan tujuan dari program/kegiatan yang direncanakan disusun Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya hasil Rapat Teknis ini akan dibahas pada acara Musrenbang Prov. Sumsel. Untuk program/kegiatan yang berhubungan dengan program/kegiatan APBN /DAK, perencanaan Perangkat Daerah telah melakukan penghimpunan dan verifikasi pada rakor teknis Perangkat Daerah sehingga pada Musrenbangnas usulan program/kegiatan prioritas dari kab/kota maupun provinsi dapat dibahas dengan Kementerian terkait.

Kinerja pelayanan perencanaan Perangkat Daerah sendiri tergambar dari sistem perencanaan yang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan perundangan dan tatacara sistem penganggaran

yang tersedia. Baik itu dari draf penyusunan dokumen perencanaan, pengusulan, evaluasi/pembahasan sampai dengan pencetakan RKA/DPA. Adapun penetapan dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dilakukan melalui penyusunan dokumen kinerja secara khusus melalui proses penyusunan sesuai mekanisme yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor industri, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Internal

- Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- Belum memadainya jumlah SDM aparatur yang memenuhi kualifikasi untuk pengembangan sektor industri.
- Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.

- Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik, hampir di seluruh bidang/subbagian.
- Masih lemahnya koordinasi antar bidang/subbagian.
- Belum optimalnya penerapan teknologi modern untuk re-improvement proses produksi dan kualitas produk IKM sehingga mengurangi daya saing produk tersebut, terutama untuk kualitas ekspor.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana bagi SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksinya.
- Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, pencegahan stunting, gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program/kegiatan OPD.

b. Eksternal

- Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan
- Masih belum tersosialisasinya Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat/pelaku industri pada umumnya.
- Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah maupun sektor dalam menghadapi isu-isu strategis saat ini, baik itu Hilirisasi Industri maupun gender, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan.

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada RPD provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera selatan adalah mewujudkan "**Sumsel Sejahtera, Unggul dan Terdepan**" Visi tersebut terjabarkan dalam 5 (lima) misi utama, yaitu:

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlanacar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Sejumlah program prioritas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi diatas dirumuskan sebagai berikut

Dengan dijalankannya program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut akan memberikan dampak sangat positif terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa diantaranya berjalan cukup lambat dan masih menyisakan tugas yang sangat berat untuk mencapai target, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan dalam rangka mencapai standar pelayanan masyarakat yang prima.

Dampak yang paling penting dari upaya pencapaian visi dan 5 misi tersebut adalah adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan baik regional, nasional maupun internasional untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan percepatan infrastruktur dasar.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

2.3.4.1. Tantangan

- Masih sedikitnya jumlah industri hilir yang ada sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan tumbuhnya industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi produk lokal maupun yang berorientasi ekspor.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap para pengrajin/wirausaha (IKM/UKM) sehingga produk yang dihasil belum berkualitas daya saing tinggi.
- Belum terealisasinya pembangunan infrastruktur yang memadai pada kawasan industri maupun Pelabuhan Laut, sehingga perlu upaya yang cepat untuk mewujudkannya.
- Belum optimalnya upaya peningkatan SDM Industri di bagian standarisasi, baik melalui program pemberdayaan PPNS maupun bimtek-bimtek yang tersedia.
- Mewujudkan tersedianya Roadmap bagi produk komoditi unggulan Sumsel seperti Karet, CPO dan kopi.

- SDM aparatur yang tersedia perlu diberdayakan secara optimal melalui peningkatan keilmuan, ketrampilan dan profesionalitas sesuai kompetensinya.
- Isu – isu strategis seperti kesetaraan gender, Gas Rumah Kaca (GRK) dan pencapaian MDG's perlu disikapi secara nyata ke dalam program kegiatan SKPD.

2.3.4.2. Peluang

- Stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup baik dapat memicu meningkatnya pertumbuhan industri terutama industri pengolahan di Sumsel.
- Event-event yang berskala nasional maupun internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan memacu pembangunan infrastruktur yang lebih maju di Sumsel.
- Terbentuknya Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mendorong terfokusnya pengembangan sektor industri lebih baik lagi terutama untuk pengembangan potensi perwilayahan industri.
- Adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tj. Api-api dan 5 Kawasan Industri serta potensi pengembangan sentra-sentra industri di Sumsel.
- Diperdakannya dokumen RPIP Sumsel lebih terkoordinasi dan selarasnya pembangunan industri di Provinsi Sumsel dan membuka peluang Dana Pusat untuk pembangunan sektor Industri tersebut.
- Sumsel merupakan salah satu penghasil Karet, CPO, Kopi dan batubara terbesar yang merupakan komoditi unggulan Sumsel, sehingga pengembangan industri berbasis agro dan gasifikasi batubara sangat potensial.
- Tersedianya lembaga penelitian dan pendidikan (Balai Riset dan Standarisasi) dan Badan Penelitian dan Inovasi Daerah menunjukkan dukungan pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pengembangan komoditi unggulan Sumsel maupun produk-produk industri lainnya, serta teknologi terapan hasil penelitian.
- Pengaruh globalisasi membuka peluang pasar yang cukup luas.

2.3.5 berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBD, diperlukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas dan tata kelola data kinerja**, melalui penataan sistem pengumpulan dan pelaporan data dari masing-masing bidang/bagian agar indikator kinerja dapat terukur secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2. **Penguatan koordinasi dan sinergi antar bidang/bagian**, khususnya dalam penyediaan data dan informasi capaian indikator kinerja, guna mendukung akuntabilitas dan ketepatan pengukuran kinerja.
3. **Evaluasi dan penyempurnaan indikator kinerja**, untuk memastikan kesesuaian dan relevansi antara indikator yang digunakan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga benar-benar mencerminkan capaian sasaran pembangunan sektor industri.
4. **Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan secara berkala**, agar perencanaan tahunan dapat menyesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah dan nasional, seperti kesetaraan gender, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, serta dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program serta memperkuat kontribusi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian misi pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui analisa hasil kebutuhan telah dilakukan berdasarkan potensi yang ada pada Kab/kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini pun telah dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dengan utusan aparatur Dinas Perindustrian 17 Kab/kota se Sumatera Selatan dan utusan aparatur Bappeda 17 Kab/kota maupun pihak Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari semua rancangan usulan program/kegiatan yang ada, setelah diadakan rapat pembahasan dengan Bappeda Provinsi Sumsel tidak sepenuhnya dapat di rangkul dalam penetapan rancangan awal perencanaan SKPD 2025 dikarenakan pemilihan program kegiatan berdasarkan sistem prioritas dan sesuai kebutuhan, selain itu juga adanya keterbatasan anggaran. Akan tetapi penetapan program / kegiatan yang ada tetap diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya hasil analisis disajikan dengan format sebagaimana pada tabel. 3 di halaman lampiran. Pada tabel tersebut antara rancangan awal dengan setelah dilakukan pembahasan dengan Bappeda provinsi Sumsel maupun komisi II DPRD Provinsi Sumsel atau setelah dilakukan penetapan terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan karena adanya efisiensi anggaran salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk kemudian dananya digunakan untuk kegiatan baru yang dibutuhkan untuk dimunculkan pada rancangan akhir penyusunan anggaran. Selain itu beberapa kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, pagu dana maupun parameter indikator kegiatan ada yang mengalami perubahan, baik itu karena adanya efisiensi anggaran dan ada juga karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seluruh dampak/perubahan yang terjadi antara rancangan awal dan rancangan yang terakhir dapat dilihat pada tabel 3 pada lampiran dokumen rencana kerja tahun 2025 ini.

Adapun tema dan prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan pada rancangan awal RKD tahun 2025 yaitu Pembangunan Ekonomi Eksklusif dan Berkelanjutan. Dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting.
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 pada lampiran 2. Review Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPD yaitu pada prioritas daerah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata dimana Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
 - Pengembangan sentra industri kecil dan menengah
2. Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan
 - Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
 - Peningkatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang terintegrasi
 - Peningkatan produktivitas dan hilirasi industri non agro didukung sistem bisnis terintegrasi
 - Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa

Tabel T-C.31.**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan**

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (RP.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perindustrian				21.285.146.797	Dinas Perindustrian				14.562.903.426	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.285.146.797	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				14.562.903.426	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				21.285.146.797	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				14.562.903.426	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	12.368.190.167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	10.908.679.821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	60.460.825	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	38.876.495	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.460.825	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.076.495	
2)	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	8.673.655.328	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	8.518.192.975	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	8.400.155.328	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	8.423.953.924	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	250.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	85.738.272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	5.000.779	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.500.000	
3)	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		42.680.000	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		42.680.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	42.680.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	42.680.000	
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	36.402.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	10.000.000	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	36.402.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	10.000.000	
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Jumlah Paket dari hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	829.299.169	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Jumlah Paket dari hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	291.547.986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	157.249.580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.600.000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	27.281.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	13.640.750	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	515.768.089	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	206.307.236	
6)	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Tersedianya laporan dari hasil kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.017.492.845	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Tersedianya laporan dari hasil kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.819.840.637	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	767.492.845	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	575.840.637	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.240.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.240.000.000	
7)	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Tersedianya laporan hasil kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	708.200.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Tersedianya laporan hasil kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	187.541.728	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit	416.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit	166.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	41.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	16.680.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	4.261.728	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase ketercapaian pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri	100%	8.641.895.905	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase ketercapaian pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri	100%	3.559.205.387	
8)	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>		Tersedianya penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi dengan baik	1 dokumen	8.641.895.905	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>		Tersedianya penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi dengan baik	1 dokumen	3.559.205.387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	35.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	20.000.000	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	20.000.000	
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	7.130.129.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	2.099.465.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	339.915.937	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	200.000.000	
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1.061.850.968	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1.154.740.387	
30	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	25.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	15.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	1 dokumen	-	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	1 dokumen	50.000.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Terlaksananya program pengendalian izin usaha industri	230 Industri	150.060.725	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Terlaksananya program pengendalian izin usaha industri	230 Industri	45.018.218	
9)	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>		Tersedianya dokumen hasil penerbitan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	150.060.725	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>		Tersedianya dokumen hasil penerbitan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	45.018.218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	75.060.725	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	22.518.218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri	1 dokumen	75.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala	1 dokumen	22.500.000	

			Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota , selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.					usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.			
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Terlaksananya program pengelolaan sistem informasi industri nasional	230 Industri	125.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Terlaksananya program pengelolaan sistem informasi industri nasional	230 Industri	50.000.000	
10)	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>		Tersedianya dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	125.000.000	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>		Tersedianya dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	50.000.000	
34	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	1 dokumen	75.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	1 dokumen	35.000.000	

	Informasi Industri Nasional (SIINas)		Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Informasi Industri Nasional (SIINas)		Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
35	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	50.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	15.000.000	

2.5 Penelahaan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan yang ada dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota ke Provinsi sampai tingkat pusat. Dimulai dari desa/kelurahan yang mengadakan rapat untuk mengajukan usulan ke tingkat kecamatan, di kecamatan diadakan rapat kembali yaitu Musrenbangdes yang mengakomodir usulan rencana program kegiatan yang terpilih atau prioritas. Hasil dari musrenbangdes akan dibawa ke musrenbangcam di tingkat kecamatan, setelah itu hasil musyawarah/rapat musrenbangcam akan dilanjutkan pada Musrenbang Kab/kota.

Musrenbangkab /kota yang diadakan pada Kab/kota diikuti oleh SKPD-SKPD, Kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur muspida kab/kota serta Bappeda Kab/kota sebagai koordinator. Pada tingkat ini diharapkan usulan rencana program kegiatan sudah mengakomodir seluruh kepentingan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan sistem prioritas. Selain itu usulan program kegiatan tersebut juga harus didistribusikan sesuai pemangku kepentingan atau SKPD terkait. Pada tingkat kab/kota dimana rencana program kegiatan sudah terdistribusi pada pemangku kepentingan atau instansi / SKPD masing-masing, dapat mengajukan beberapa usulan rencana program kegiatan ke pemangku kepentingan / SKPD tingkat Provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan / SKPD masing-masing yang didampingi oleh Bappeda Provinsi. Pada Rakor Teknis SKPD tingkat Provinsi penyusunan perencanaan program/kegiatan harus sesuai dengan rancangan RKP dan Renstra K/L, mengacu pada fokus dan prioritas yang ada dan adanya Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani SKPD Teknis dan Bappeda baik Provinsi maupun Kab/Kota.

Dari pemangku kepentingan/SKPD tingkat Provinsi, beberapa usulan program kegiatan kemudian diteruskan ke pemangku kepentingan / Kementerian masing-masing atau lembaga di tingkat pusat.

Adapun rencana program kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 disajikan dengan format sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.32 lampiran 1. Dan pada tahun anggaran 2026 ini Dinas Perindustrian hanya mendapatkan Dana operasional dan program/kegiatan teknis dengan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan program/kegiatan pengembangan sektor industri lainnya tidak dapat diakomodir terutama usulan program/kegiatan teknis dari kab/kota dan masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan dari Para Pemangku
Kepentingan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Sustainable Development Goals (SDG's). Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan lebih difokuskan pada penerjemahan dan pengintegrasian kebijakan nasional tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan kewenangan di bidang perindustrian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja sebagai berikut :

3.3. Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 40 sub kegiatan operasional dan kegiatan teknis bidang Perindustrian dengan pagu dana Rp.14.562.903.426,- yang bersumber pada dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja tahun 2026 pada tabel dibawah sebagai berikut :

TABEL T-C 33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				14.562.903.426	APBD	-		
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Kantor Dinas Perindustrian Sumsel		14.562.903.426	APBD	-		35.193.986.592
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	10.908.679.821	APBD	-	100%	16.939.474.175
3.31.01.1.01.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan perencanaan, panganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	38.876.495	APBD	-	1 dokumen	859.000.000

3.31.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	164.000.000
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	5.000.000	APBD	-	1 dokumen	20.000.000
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	5.000.000	APBD	-	1 dokumen	20.000.000
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	5.000.000	APBD	-	1 dokumen	20.000.000
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	5.000.000	APBD	-	1 dokumen	20.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	10.800.000	APBD	-	1 Laporan	175.000.000
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	8.076.495	APBD	-	1 Laporan	163.000.000
	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	137.000.000
	Penyelenggraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	140.000.000
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	8.518.192.975	APBD	-	100%	9.150.474.175
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	53 Orang/ Bulan	8.423.953.924	APBD	-	-	8.750.474.175
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	85.738.272	APBD	-	-	250.000.000
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	5.000.779	APBD	-	1 dokumen	50.000.000
3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	3.500.000	APBD	-	1 laporan	50.000.000
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel		42.680.000	APBD	-	100%	230.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	42.680.000	APBD	-	1 dokumen	115.000.000
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	1 Laporan	115.000.000
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dari hasil kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	10.000.000	APBD	-	1 dokumen	420.000.000
	Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	1 Dokumen	120.000.000
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	3 orang	10.000.000	APBD	-	10 orang	300.000.000
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Paket dari hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	291.547.986	APBD	-	100%	1.950.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	12.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	20.000.000	APBD	-	1 Paket	450.000.000
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	19.600.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	20.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	13.640.750	APBD	-	1 Paket	50.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	206.307.236	APBD	-	1 Laporan	900.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	100%	450.000.000
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	1 Unit	450.000.000
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan dari hasil kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	1.819.840.637	APBD	-	100%	2.430.000.000
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	4.000.000	APBD	-	1 Laporan	70.000.000
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	575.840.637	APBD	-	1 Laporan	1.120.000.000
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	1.240.000.000	APBD	-	1 Laporan	1.240.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan hasil kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Laporan	187.541.728	APBD	-	100%	1.450.000.000
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	12 unit	166.600.000	APBD	-	9 unit	500.000.000
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 unit	16.680.000	APBD	-	1 unit	250.000.000
3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 unit	4.261.728	APBD	-	1 unit	700.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	3.559.205.387	APBD	-	100%	16.679.512.417
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.02.1.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	Tersedianya penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	3.559.205.387	APBD	-	100%	16.679.512.417
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	20.000.000	APBD	-	1 dokumen	260.000.000
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	20.000.000	APBD	-	1 dokumen	726.000.000
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	2.099.465.000	APBD	-	1 dokumen	7.968.512.417
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	200.000.000	APBD	-	1 dokumen	2.100.000.000
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	1.154.740.387	APBD	-	1 dokumen	2.320.000.000
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	15.000.000	APBD	-	1 dokumen	255.000.000
	Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan, penyebaran dan perwilayahan industri	data dan informasi dalam rangka evaluasi percepaan, penyebaran, dan perwilayahan industri.	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	800.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka evaluasi percepatan,penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri.	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	800.000.000
	Rekomendasi kebutuhan dalam rangka evaluasi percepatan,penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi Kebutuhan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri.	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-	-	-	-	800.000.000
3.31.02.1.01.10	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Halal (JPH) di Level Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	650.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya program pengendalian izin usaha industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	45.018.218	APBD	-	100%	825.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.31.03.1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	Tersedianya dokumen hasil penerbitan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	45.018.218	APBD	-	100%	825.000.000
--------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------	----------	-------------	--------------------

3.31.03.1.01.03	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	22.500.000	APBD	-	1 dokumen	412.500.000
-----------------	--	---	-----------------------------------	-----------	------------	------	---	-----------	-------------

3.31.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	22.518.218	APBD	-	1 dokumen	412.500.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terlaksananya program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	50.000.000	APBD	-	100%	750.000.000
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	750.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	35.000.000	APBD	-	1 dokumen	375.000.000
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	15.000.000	APBD	-	1 dokumen	375.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung tujuan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta memberikan pelayanan publik, maka dana yang dibutuhkan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp14.562.903.426,- (Empat belas miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Secara rinci program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PILIHAN				
	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>tersedianya dokumen hasil kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>38.876.495</i>
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	dokumen	1	5.000.000
	- Biaya penjilidan		buku	25	1.250.000

1	2	3	4	5	6
	- Fotocopy		lembar	3770	1.885.000
	- Box File		buah	5	275.000
	- Map plastik		lusin	2	170.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	10	650.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	9	495.000
	- Kertas HVS Quarto 70 gr		rim	5	275.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	dokumen	1	5.000.000
	- Biaya penjilidan		buku	25	1.250.000
	- Fotocopy		lembar	3820	1.910.000
	- Box File		buah	5	275.000
	- Map plastik		lusin	2	170.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	9	495.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	5	250.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	10	650.000
3	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	5.000.000
	- Fotocopy		lembar	3770	1.885.000
	- Biaya penjilidan		buku	25	1.250.000
	- Box File		buah	5	275.000
	- Map plastik		lusin	2	170.000

1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	10	650.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	9	495.000
	- Kertas HVS Quarto 70 gr		rim	5	275.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	5.000.000
	- Fotocopy		lembar	3770	1.885.000
	- Biaya penjiilidan		buku	25	1.250.000
	- Box File		buah	5	275.000
	- Map plastik		lusin	2	170.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	9	495.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	10	650.000
	- Kertas HVS Quarto 70 gr		rim	5	275.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	10.800.000
	-Map Kambing		Pack	2	200.000
	-Tinta Printer Hitam dan Warna		Set	1	300.000

1	2	3	4	5	6
	-Kertas HVS A4 70g		rim	3	180.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	3	195.000
	- Cetak Laporan		Paket	1	2.000.000
	- Perjalanan Dinas Biasa		Paket	1	7.925.000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	8.076.495
	-Tinta Printer Hitam dan Warna		Set	1	300.000
	-Kertas HVS A4 70g		rim	2	120.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	2	130.000
	- Cetak Laporan		Paket	1	1.000.000
	- Perjalanan Dinas Biasa		Paket	1	6.526.495
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	53	8.423.953.924
	-Belanja Gaji Pokok ASN		Tahun	1	2.415.378.776
	-Belanja Gaji Poko PPPK		Tahun	1	1.236.798.620
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Tahun	1	236.252.000
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		Tahun	1	144.119.184
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Tahun	1	287.420.000
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Tahun	1	39.750.000
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		Tahun	1	69.860.000

1	2	3	4	5	6
	- Belanja Tunjangan Beras PNS		Tahun	1	112.237.000
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK		Tahun	1	72.999.360
	- Belanja Tunjangan PPh / tunjangan Khusus PNS		Tahun	1	81.480.000
	- Belanja Tunjangan PPh / tunjangan Khusus PPPK		Tahun	1	15.005.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS		Tahun	1	169.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK		Tahun	1	33.264
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Tahun	1	220.827.000
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Tahun	1	52.369.320
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Tahun	1	6.087.000
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Tahun	1	2.761.584
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Tahun	1	18.259.000
	- Belanja Iuran Jaminan Kematiaan PPPK		Tahun	1	7.750.176

1	2	3	4	5	6
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Tahun	1	12.680.000
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Tahun	1	5.750.640
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Tahun	1	3.268.367.000
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		Tahun	1	117.600.000
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	85.738.272
	- Belanja ATK		Paket	1	5.000.000
	- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Kelola Keuangan		Tahun	1	65.738.272
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		Tahun	1	15.000.000
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	5.000.779

1	2	3	4	5	6
	- Belanja ATK		Paket	1	2.500.779
	- Belanja Cetak		Paket	1	2.500.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	3.500.000
	- Belanja ATK		Paket	1	1.000.000
	- Belanja Cetak		Paket	1	2.500.000
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	42.680.000
	- Belanja Asuransi Mobil Mitsubishi Expander		Tahun	1	5.680.000
	- Belanja Asuransi Mobil Mitsubishi Pajero		Tahun	1	8.000.000
	- Belanja Asuransi Mobil Toyota Inova		Tahun	1	7.500.000
	- Belanja Asuransi Motor Vario		Tahun	1	1.000.000
	- Belanja Asuransi Motor Supra X		Tahun	1	1.000.000
	- Belanja Asuransi Mobil Avanza 2 Buah		Tahun	1	12.000.000
	- Belanja Asuransi Mobil Triniton		Tahun	1	7.500.000

1	2	3	4	5	6
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	10.000.000
	- Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Pelatihan		Paket	1	10.000.000
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000
	- Alat Kelistrikan		set	1	1.800.000
	- Lampu (sfesifikasi ukuran 14 watt philips SL)		buah	25	1.450.000
	- Lampu (Spesifikasi : Ukuran 14 Watt Philips SL)		buah	250	8.750.000
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000
	- Batre Energizer AAA		buah	10	138.000
	- Map Ordener (Spesifikasi : Bindex UK, Folio Goby)		buah	50	1.150.000

1	2	3	4	5	6
	- Pena (Spesifikasi : Pilot HI-TEC-C 0,3 BLLH-20C3)		kotak	10	301.500
	- Map Plastik		buah	50	500.000
	- Binder Klips 105		kotak	10	50.000
	- Buku Agenda		buah	10	380.000
	- flashdisk		buah	5	300.000
	- Pena Balliner (Spesifikasi : Warna Hitam		kotak	5	1.000.000
	- Refil Infus (Spesifikasi : Printer Canon Black)		buah	5	330.625
	- Toner (spesifikasi Hp Laser Jet M1212 HP 85 A)		buah	1	816.815
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	60	3.900.000
	- Kertas quarto 70 gr		rim	20	1.100.000
	- map Plastik		kotak	1	33.060
	- Filling Kabinet		Paket	1	5.000.000
	- Printer		buah	2	5.000.000
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.600.000
	- Kain lap ukuran sedang		lembar	6	180.000
	- Kain pel warna biru besar		lembar	10	400.000

1	2	3	4	5	6
	- Pembersih kaca merk clear isi 410 gr		buah	24	912.000
	- Sapu bulu ayam / kemoceng ukuran biasa		buah	6	231.000
	- Sapu lantai bahan plastik		buah	6	300.000
	- gayung plastik standar		buah	6	169.500
	- Sikat WC pakai gagang nagata		buah	6	96.000
	- Serok sampah Uk. Sedang Nagata		buah	6	321.000
	- Keset kaki bahan tebal		buah	12	936.000
	- Tisu Kotak		kotak	40	640.000
	- Lap mobil		tube	6	576.000
	- Pewangi mobil kaleng merk Fresh		buah	12	546.000
	- Rinso uk. 900 gr		Per Bungkus	24	444.000
	- Sabun cuci Delina uk. 300 gr		Per Bungkus	1	2.400
	- Sunlight liquid 800 ml		buah	24	876.000
	- Pembersih kloset merk bebek 450 ml		buah	6	126.000
	- Alat pewangi ruangan elektrik merk Stella matic		buah	12	936.000
	- Pembersih lantai Porstek uk. 2000 ml		buah	12	222.000

1	2	3	4	5	6
	- Karbol wangi merk densol 1 Liter		buah	10	450.000
	- Kain serbet motif kotak-kotak		buah	6	75.000
	- Shampo mobil Botol Kit		botol	2	69.000
	- Clear pembersil kaca uk. 500 ml		Kaleng	12	216.000
	- Pewangi gantungan merk Stella 70 gr		buah	12	276.000
	- Kaset Ambal		buah	5	600.100
	- Dispenser		buah	2	5.000.000
	-Kompor 2 tungku		buah	2	4.000.000
	- Rice cooker		buah	2	1.000.000
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat, Tamu, Koordinasi Intern (Selama 1 tahun)		kotak	500	20.000.000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.640.750
	- Amplop Lambang Dinas (Spesifikasi ; Uk Kecil)		lembar	500	1.000.000
	- Blangko SPM (Spesifikasi : 50 Set @ 5 Lembar)		buku	20	2.500.000

1	2	3	4	5	6
	- Belanja Bahan / Alat cetak Spesifikasi : Spanduk		buah	20	7.000.000
	- Kertas Kop lambang Garuda (Spesifikasi : Warna kuning mas Timbul, uk. 1/2 Folio HVS 80 Gr)		rim	2	400.000
	- Lembar Disposisi		buku	10	450.000
	- Kertas Kop Sekda		rim	3	750.000
	- Map Lambang Dinas		lembar	250	540.750
	- Fotocopy Penggandaan		lembar	2000	1.000.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	206.307.236
	- Tinta Printer Hitam dan Warna		set	2	600.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	2	120.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	325.000
	- Cetak		Paket	1	5.000.000
	- Honorarium Narasumber dari Luar daerah (Kementerian / Pusat) (2 orang x 2 Hari x 4 Jam x 1 Kegiatan)		Orang	2	8.000.000
	- Perjalanan Dinas Biasa (Rutin)		Paket	1	192.262.236

1	2	3	4	5	6
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.000.000
	- Materai		buah	400	4.000.000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	575.840.637
	- Belanja Pembayaran Air (Dinas Perindustrian)		Tahun	1	25.000.000
	- Belanja Tagihan Listrik		Tahun	1	403.175.035
	- BELANJA INTERNET		Tahun	1	147.665.602
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.240.000.000
	- Belanja Jasa Tutor SKJ		kali	44	22.000.000
	- Belanja jasa tenaga kebersihan (7x12) dekranasda jakabaring		Orang	84	294.000.000
	- Belanja jasa tenaga kebersihan (7x12) dinas perindustrian		Orang	84	294.000.000
	- Belanja jasa tenaga kebersihan (6x12) kriya sriwijaya		Orang	72	252.000.000
	- Belanja jasa tenaga keamanan (8x12)		Orang	96	336.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Supir (2x12 bulan)		Orang	12	42.000.000

1	2	3	4	5	6
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	12	166.600.000
	- Pertamina		Liter	5000	77.500.000
	- Dexlite		Liter	1000	16.500.000
	- Belanja Penggantian Suku Cadang		Tahun	1	37.000.000
	- Penggantian Suku Cadang AC-Gulung dinamo(Electro Motor AHU, Indoor Fan) Outdoor Fan		Paket	1	4.000.000
	- Service mobil (minibus) tune up mesin		kali	1	4.000.000
	- Service motor tune up mesin		Paket	1	2.000.000
	- Pajak Kendaraan Bermotor (3 Unit)		Tahun	1	3.000.000
	- Belanja surat tanda nomor kendaraan/pajak kendaraan mobil (6 unit)		Tahun	1	22.600.000
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	16.680.000
	- Service AC - Cuci AC		Unit	22	7.700.000

1	2	3	4	5	6
	- Service Komputer-Printer		buah	20	8.980.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.261.728
	- Biaya Perencanaan Kontruksi Kantor Dinas Perindustrian		Paket	1	4.261.728
25	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	20.000.000
	- Fotocopy + jilid		Paket	1	500.000
	- Honorarium Narasumber		Paket	1	11.500.000
	- Perjalanan Dinas Biasa		Paket	1	8.000.000
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	1	20.000.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	350.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon III, IV dan Staf)		Paket	1	19.650.000

1	2	3	4	5	6
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	2.099.465.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	16	992.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	16	1.072.000
	- Cetak Laporan		buah	5	1.000.000
	- Cetak Laporan fotocopy		lembar	2082	1.401.000
	- Cetak Piagam		buah	44	1.100.000
	- Cetak Spanduk		buah	2	400.000
	- Belanja Bahan Materi Promosi Dekranasda		Paket	1	230.000.000
	- Belanja dokumentasi audio visual pembinaan industri kecil menengah		Paket	1	20.000.000
	- Belanja Bahan Materi Promosi Produk IKM		Paket	2	35.000.000
	- Belanja Bahan Perlengkapan Peserta (40 org x 2 kegiatan)		Paket	40	26.000.000
	-Seminar KIT pelatihan (40 org x 2 kegiatan)		Paket	40	4.000.000
	- dokumentasi pelatihan (Belanja dokumentasi audio visual pelatihan)		Paket	1	600.000

1	2	3	4	5	6
	- Belanja bahan perlengkapan peserta, 150 org x 1 paket		paket	150	15.000.000
	- Beban Makanan dan Minuman Kegiatan		orang	215	10.750.000
	- belanja konsumsi pelatihan - makan (60 org x 3 hr x 1 kl x 2 kgt)		kotak	220	10.800.000
	- belanja konsumsi pelatihan - snack (60 orgx3 hr x 2 kl x 2 kgt)		kotak	480	14.400.000
	- Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah		stel	23	17.250.000
	- Belanja pakaian batik tradisional		Paket	2	14.000.000
	- Honorarium asisten instruktur pelatihan, 2 orang x 3 hr x 8 oj x 2 kgt		orang/jam	48	9.600.000
	- Honorarium instruktur pelatihan, 2 orang x 3 hr x 8 oj x 2 kgt		orang/jam	48	14.400.000
	-Jasa Event Organizer Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV (MC, Moderator, Tarian, User, Pic, Lo, Crew, Model) Kriya Nusa		kegiatan	1	100.000.000

1	2	3	4	5	6
	- Jasa Event Organizer Jasa Pihak Ketiga Event Organizer (KONTRAPRESTASI IKONIK KRIYA NUSA)		Paket	1	1.150.000.000
	- Biaya Transportasi Angkut Bahan Pameran		paket	1	5.000.000
	- Sewa mobil pick up		buah	2	1.200.000
	- Belanja Sewa Stand Pameran/Slot/Fashion show/dekorasi/Sewa Tempat/sewaperengkapan umum lainnya		Paket	3	205.500.000
	- Belanja Sewa Gedung pelatihan 3 hr x 2 kgt		hari	6	6.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Paket	2	190.000.000
	-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pelatihan		Paket	2	14.000.000
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1	200.000.000
	- Materi dan Desain Pameran		paket	1	99.840.000
	-Promosi Produk Kopi Sumsel		pcs	500	12.500.000
	-Uang Makan		kotak	30	1.830.000

1	2	3	4	5	6
	- Uang Snack		kotak	30	570.000
	- Sewa Stan Pameran Kopi Sumsel		Paket	1	50.000.000
	- Uang Trasport Pesawat (dalam rangka koordinasi)		orang/keg	6	15.000.000
	- Uang Harian Luar Kota (dalam rangka koordinasi)		orang/hari	12	6.360.000
	- Uang Penginapan Petugas (dalam rangka koordinasi)		orang/hari	8	6.400.000
	- Uang Harian Dalam Kota		orang/hari	50	7.500.000
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	1.154.740.387
	-Belanja Peralatan dan Bahan Praktek		paket	1	117.000.000
	-Map Kambing		Pack	15	1.500.000
	-PENA		buah	20	200.000
	-Tinta Printer Hitam dan Warna		Set	15	4.500.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	40	2.000.000
	- otocopy		lembar	15000	7.500.000

1	2	3	4	5	6
	- SPANDUK		buah	15	2.250.000
	-Mesin/Peralatan yang diberikan pada pelaku usaha industri		paket	1	701.960.387
	-Makan Siang		kotak	650	16.250.000
	-SNACK		kotak	1300	19.500.000
	-Seragam Pelatihan Kegiatan		Paket	1	78.000.000
	- Honorarium Narasumber		orang/jam	208	79.040.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan		paket	1	125.040.000
30	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	15.000.000
	-Catridge Printer		Set	1	500.000
	-flashdisk		buah	2	240.000
	- Tinta Printer Hitam dan Warna		set	2	1.060.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	5	275.000
	-Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	300.000
	-Perjalanan Dinas Biasa		Paket	1	12.625.000

1	2	3	4	5	6
31	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	dokumen	1	50.000.000
	-Catridge		buah	3	1.020.000
	-Kertas HVS A4		rim	4	240.000
	-Kertas HVS F4		rim	4	240.000
	-Uang Makan		kotak	100	6.100.000
	- Uang Snack		kotak	100	1.900.000
	- Transportasi (Dalam Rangka Pengawasan)		orang/hari	50	10.000.000
	- Uang Harian Dalam Kota (Dalam Rangka Pengawasan)		orang/hari	25	9.500.000
	- Uang Penginapan Dalam Kota (Dalam Rangka Pengawasan)		orang/hari	30	21.000.000

1	2	3	4	5	6
32	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	dokumen	1	22.500.000
	- Catridge Printer		buah	2	638.000
	- Tinta Printer Hitam HP Ink Tank 319		buah	2	240.000

1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	350.000
	- Dinas Verifikasi Teknis Ke 5 (Lima) Kabupaten Sesuai Dengan Permohonan dariPerusahaan		Paket	1	21.272.000
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	1	22.518.218
	- Catrige Printer		buah	2	638.000
	- Pena Balliner Hitam		kotak	2	780.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	350.000
	- Cetak Spanduk 6M x 4M		meter	24	480.000
	- Fotocopy		lembar	2000	1.000.000
	- Makan Siang		kotak	100	4.600.000
	- Snack		kotak	100	1.600.000
	- Honorarium MC		orang	1	400.000

1	2	3	4	5	6
	- Honorarium Narasumber Eselon III		orang	2	1.800.000
	- Honorium Narasumber Eselon 2		orang	2	2.000.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kota Jakarta Ke Ditjen KPAII kementerianPerindustrian RI		Paket	1	8.870.218
34	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	35.000.000
	- Fotocopy + jilid		Paket	1	15.000.000
	- Catridge Printer		buah	1	510.000
	- Map Kambing		kotak	10	1.000.000
	- Pena Standard		kotak	1	32.500
	- Tinta Printer Hitam dan Warna		Set	1	300.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	20	1.200.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	20	1.300.000
	- Perjalanan Dinas Biasa		Paket	1	15.657.500

1	2	3	4	5	6
35	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	1	15.000.000
	- Map Ordener Bambi 1010 CW-13 Cream Wood		buah	3	210.000
	- Kertas HVS A4 70 gr		rim	3	195.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr		rim	5	350.000
	- Perjalanan Dinas Biasa Ke 5 Kabupaten/Kota		Paket	1	14.245.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, serta kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih akan menghadapi dinamika pembangunan yang terus berkembang. Kondisi tersebut memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pembangunan sektor industri daerah.

Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang telah disusun akan menjadi arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja ini disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan dan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Apabila pagu anggaran yang tercantum dalam Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi anggaran Belanja Program sebesar Rp14.562.903.426,- (Empat belas miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis

pembangunan sektor industri daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2026 secara optimal sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja Tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon tantangan di masa mendatang melalui prioritas kegiatan adalah:

1. Seluruh unsur di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program dan kegiatan Renja Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 guna memastikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini, cita-cita dan harapan dalam mewujudkan pembangunan industri daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.